

## **Sambutan Pada Peluncuran Buku “Pembangunan Untuk Rakyat”**

Ketika Gutenberg pada abad pertengahan di Eropa menciptakan mesin cetak, sejak itu buku, sebagai sumber pengetahuan dan ilmu pengetahuan, menjadi mudah diperoleh karena dapat diproduksi dalam jumlah berganda. Dengan demikian, akses pada pengetahuan dan ilmu pengetahuan menjadi terbuka lebar melalui buku.

Kita memang bergembira sekarang ini sudah makin mudah memperoleh buku-buku untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan kita. Akan tetapi, kita pun sepatutnya prihatin bahwa karangan asli penulis kita sendiri masih terbatas jumlahnya sehingga para mahasiswa dan cendekiawan termasuk kita-kita sendiri masih harus banyak mengandalkan pada buku-buku asing. Memang pengetahuan tidak dibatasi oleh tapal batas negara, tetapi untuk kepentingan bangsa kita sendiri, perlu pula penulisan-penulisan yang bersumber dari dalam diri kita sendiri.

Ketika Cides menawarkan untuk membukukan berbagai tulisan saya yang berupa esei, makalah, dan kuliah, saya sambut dengan gembira karena dengan demikian saya memperoleh kesempatan untuk memberikan sumbangan pada kelangkaan tulisan dari kalangan kita sendiri. Saya tidak berpretensi bahwa seluruh apa yang saya ungkapkan dalam buku ini benar. Dalam ilmu pengetahuan, tidak ada kebenaran yang mutlak. Ilmu pengetahuan berkembang secara kumulatif dalam suatu proses yang panjang. Teori, konsep, dan gagasan akan selalu berinteraksi dengan teori, konsep, dan gagasan yang lain, dan dari dialog itu biasanya lahir gagasan, konsep, atau bahkan teori baru. Bagi kita sebagai bangsa dan negara yang sedang berkembang, dialog serupa itu penting karena kita sangat membutuhkan gagasan-gagasan baru yang lahir dari permasalahan di negeri kita sendiri.

Dengan latar belakang demikian buku ini diterbitkan dengan maksud memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengisi dan mensukseskan pembangunan nasional pasca-lima puluh

tahun Indonesia merdeka. Buku ini sumber pokoknya adalah kumpulan tulisan dan pandangan yang pernah saya sampaikan di berbagai kesempatan, dan isinya merupakan refleksi pemikiran dan pengalaman saya bergelut dengan permasalahan-permasalahan pembangunan selama ini.

Sebagai latar belakang pemikiran, pembangunan kita pahami sebagai upaya menciptakan kehidupan yang sejahtera, yang sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pada dekade-dekade awal, yaitu tahun 1950-an dan 1960-an perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang sangat tergantung pada para ahli dari negara-negara maju serta tenaga ahli dari negara berkembang yang mengikuti pendidikan di negara maju. Mereka pada umumnya merumuskan konsep-konsep pembangunan berdasarkan pengalaman empiris negara-negara maju dan teori-teori yang dikembangkan atas dasar pengalaman tersebut. Pendekatan pembangunan tersebut terutama bertitik berat pada pembangunan ekonomi dengan asumsi bahwa hasil pembangunan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan dan menghapus kemiskinan.

Berdasarkan pandangan tersebut penanaman modal dan penerapan teknologi modern diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, menyerap angkatan kerja di sektor subsisten ke lapangan kerja modern atas dasar upah, dan dengan sendirinya akan menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Pola yang ditempuh adalah proses industrialisasi, sebagaimana yang dialami negara-negara maju yang telah menghasilkan peningkatan taraf hidup yang cepat dan telah menghilangkan kemiskinan di sektor subsisten. Sasaran awal yang penting adalah

mencapai kemampuan untuk mandiri dalam melanjutkan pembangunan, atau mencapai kondisi yang disebut “*take-off*” atau “lepas landas.”

Kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak negara, meskipun dengan penanaman modal dan penerapan teknologi modern, tidak mampu menghasilkan pertumbuhan pada tingkat yang cukup memadai untuk mencapai tahapan lepas landas itu. Bahkan di beberapa negara yang mencatat pertumbuhan tinggi sekali pun, kondisi kemandirian tidak wujudkan. Yang terjadi adalah ketergantungan atau keterikatan akan hutang yang makin besar.

Dampak yang lebih buruk lagi tercermin pada makin melebarnya kesenjangan. Hal ini karena kegiatan yang menghasilkan pertumbuhan itu hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat dan umumnya di wilayah terbatas. Akibatnya, hasil yang diperoleh dari pertumbuhan itu hanya dinikmati sejumlah kecil orang dan di wilayah tertentu saja. Dunia juga makin menyadari akan adanya bahaya kerusakan alam yang dapat mengganggu kelanjutan kehidupan manusia di muka bumi ini akibat pembangunan yang memberi penekanan yang berlebihan kepada pertumbuhan. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut telah dikembangkan berbagai alternatif terhadap konsep pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan.

Berkembanglah cara pandang bahwa dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan, selain upaya pertumbuhan ekonomi, diperlukan juga pembangunan yang berorientasi kepada manusia, yang dikenal dengan berbagai nama. Pertumbuhan ekonomi diyakini tetap diperlukan tetapi disadari bahwa bukanlah satu-satunya kriteria dan juga tidak selalu harus yang paling utama, karena harus serasi dengan pembangunan sosial yang fokusnya adalah pada manusia dan kualitas dan kesinambungan kehidupannya.

Semua konsep pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, kesejahteraan tersebut ingin dicapai dengan membangun harkat dan sesuai dengan martabat kemanusiaan, karena pada

dasarnya manusia berkeinginan untuk membangun kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya dengan berlandaskan kepada kemampuannya sendiri dan dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Manusia yang bermartabat tidak akan puas dengan kehidupan karena belas kasihan orang lain, dan tidak ingin tergantung kepada bantuan orang lain. Oleh karena itu, satu paradigma yang tidak pernah berubah sepanjang sejarah manusia adalah kebutuhan manusia akan lapangan pekerjaan.

**Pengangguran** dengan demikian merupakan tantangan utama pembangunan, dan merupakan masalah pertama yang selalu menjadi pusat perhatian ilmu ekonomi dan ekonomi pembangunan, dan merupakan penyebab masalah sosial yang utama. Khususnya di negara berkembang keterbatasan lapangan pekerjaan, disertai pula dengan kondisi **kemiskinan**, yang disebabkan antara lain oleh eksploitasi dalam masa penjajahan. Keadaan miskin ini setelah kemerdekaan tidak otomatis teratasi, dan seperti telah dikemukakan di atas ada kecenderungan di negara berkembang keadaannya menjadi makin buruk.

Kemiskinan dengan demikian merupakan masalah kedua yang menjadi pusat perhatian pembangunan, dan merupakan masalah ekonomi dan masalah sosial. Kita mengenal berbagai bentuk kemiskinan. Kemiskinan absolut, yaitu taraf kehidupan miskin di bawah suatu garis pendapatan (atau konsumsi) tertentu yang menjadi batas minimum untuk manusia dapat hidup secara layak. Selain itu ada juga kemiskinan relatif, yakni perbandingan tingkat pendapatan antara berbagai golongan pendapatan. Hal ini terkait dengan masalah **ketimpangan**. Perbedaan pendapatan tentu selalu ada karena adanya perbedaan dalam potensi atau *endowments* manusia, masyarakat, atau bangsa. Akan tetapi apabila perbedaan tersebut terlalu jauh, maka terjadilah ketimpangan.

Oleh karena itu ketimpangan adalah masalah sosial yang ketiga, yang juga ingin diatasi dengan upaya pembangunan. Ketimpangan memiliki berbagai wujud. *Pertama*, ketimpangan antargolongan

pendapatan seperti yang telah disebut di muka. *Kedua*, ketimpangan antardaerah dan dapat juga antarkelompok etnis atau agama (di negara-negara tertentu). *Ketiga*, ketimpangan antarsektor, seperti sektor pertanian dan industri atau sektor perkotaan (*urban*) dan perdesaan (*rural*). *Keempat*, ketimpangan jender, yakni antara pria dan wanita. *Kelima*, yang sebetulnya dapat dikatakan menjadi penyebab dari berbagai bentuk ketimpangan di atas adalah ketimpangan dalam kesempatan. *Keenam*, ketimpangan antarmasyarakat di dunia maju dan di dunia berkembang. Hal ini yang menimbulkan gejala yang disebut **keterbelakangan**, dan melahirkan ketergantungan (*dependency*), yang merupakan masalah pembangunan yang keempat.

Keterbatasan lapangan kerja, kemiskinan, ketimpangan dan keterbelakangan, adalah empat masalah dasar yang ingin dipecahkan dengan pembangunan. Keempat hal tersebut, selain merupakan lawan dari keadaan sejahtera, juga merupakan penghalang bagi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi juga mencerminkan ketidakadilan, dan dengan demikian, bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Konsep pembangunan kita sejak beberapa waktu yang lalu sudah memperhatikan berbagai paradigma tersebut. Kalau kita pelajari konsep-konsep pembangunan pada beberapa repelita terakhir selama PJP I, kita akan melihat adanya benang merah itu, seperti tercermin dalam Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Dalam PJP II, kita ingin lebih menegaskan komitmen dan keberpihakan kita kepada upaya pembangunan yang berakarkan kerakyatan itu. Dasar-dasarnya telah ada yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1993 (GBHN 1993), yang sangat jelas memberikan tekanan kepada tujuan keadilan sosial dari pembangunan.

Dalam buku ini saya tekankan pentingnya tanggung jawab kita sebagai golongan terpelajar untuk memahami dan menjabarkan amanat rakyat yang dituangkan dalam GBHN 1993 ke dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan pembangunan. Saya tekankan juga bahwa walaupun keadaan dan

tantangan telah banyak berubah, dalam menetapkan langkah-langkah untuk menghadapi tantangan di masa depan kita semestinya tetap mengacu pada konstitusi dan amanat rakyat untuk memastikan bahwa pembangunan yang kita laksanakan adalah bagi kepentingan rakyat.

Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat tidak berarti akan menghambat upaya mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan hanya akan sinambung dalam jangka panjang jika sumber utamanya berasal dari rakyat sendiri, baik itu berupa produktivitas rakyat maupun dana yang dihimpun melalui tabungan rakyat. Makin kita tumbuh dan berkembang atas daya rakyat sendiri, makin kukuh kemandirian kita sebagai bangsa. Kemandirian yang kita bangun adalah dengan rasa percaya diri dan dalam keterbukaan pergaulan dengan bangsa lain, bukan dalam keterisolasian yang menyebabkan kemandekan.

Dalam kecenderungan liberalisasi, regionalisasi, dan globalisasi yang memberikan ciri pada interaksi perekonomian sekarang ini, kita membutuhkan daya tahan dan daya saing nasional yang harus kita bangun dari dalam. Ketangguhan perekonomian nasional tidak dapat berkembang hanya dengan membuka perekonomian kita pada persaingan internasional, tetapi kita harus membangunnya dengan dukungan sumber daya manusia kita sendiri dan dengan kemampuan kita di dalam negeri. Dengan demikian, maka persaingan internasional akan melengkapi dan memperkuat kemampuan yang telah kita bangun terlebih dahulu.

Buku ini membahas mulai dari upaya menerjemahkan GBHN ke dalam strategi dan kebijaksanaan pembangunan; membangun ekonomi rakyat yang ditopang oleh usaha kecil dan menengah yang menampung sebagian besar tenaga kerja kita; upaya mengembangkan sumber utama pembangunan yaitu sumber daya manusia dan teknologi; memecahkan berbagai permasalahan pembangunan yang disebut di atas, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan

kesempatan kerja produktif, serta pembangunan regional; sampai pada apa yang ingin kita capai pada masa mendatang sebagai bangsa yang maju. Pemikiran yang sangat mendasari dan mewarnai pandangan-pandangan dalam buku ini adalah konsep pemberdayaan. Pembangunan juga harus diawali dan dilandaskan pada pemahaman kita yang kuat sebagai bangsa, oleh karena itu wawasan kebangsaan adalah semangat yang ada dalam buku ini. Buku ini diakhiri dengan renungan mengenai tantangan pembangunan masa depan dan agenda-agenda pembangunan untuk mengatasinya. Salah satu di antaranya adalah penguatan kebudayaan bangsa.

Harapan saya adalah bahwa karya yang kecil ini dapat bermanfaat bagi mereka yang terlibat (*stakeholders*) dalam pembangunan, yakni para peneliti dan pemerhati pembangunan, para mahasiswa studi pembangunan, serta masyarakat luas yang berminat mengikuti arah gerak pembangunan kita.

Sampainya buku ini dalam bentuknya sekarang ini adalah berkat bantuan rekan-rekan saya di Bappenas, dan untuk itu saya sangat berterima kasih. Saya harus mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Sdr. Umar Juoro yang bertindak sebagai editor sehingga membuat rangkaian pembahasan buku ini menjadi lebih urut. Kepada Sdr. Adi Sasno dan staf CIDES, terutama kepada Sdr. Djumhur Hidayat, saya mengucapkan terima kasih atas prakarsanya menerbitkan buku ini. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan saya, Sdr. Jakob Oetama yang telah bersedia memberikan kata pengantar, dan kepada Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, serta Prof. Dawam Rahardjo, yang telah bersedia mengulasnya.

Jakarta, 28 Oktober 1996

**Ginandjar Kartasasmita**